

GERAKAN FEMINISME DI INDONESIA : TANTANGAN DAN STRATEGI MENDATANG*

Sri Hidayati Djoeffan**

Abstrak

Era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi. Krisis berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh ORBA yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang hingga kini belum pulih. Buruknya kondisi tersebut ditambah pula dengan berjalannya era industrialisasi yang merambah kota maupun desa, serta efek globalisasi yang kesemuanya telah menimbulkan kompetisi dalam berbagai aspek kehidupan, secara khusus telah memberikan dampak pada kehidupan perempuan Indonesia yang dapat dinilai sebagai suatu hambatan maupun sebagai suatu peluang.

Adanya penurunan kesejahteraan secara nasional, telah mendorong wanita untuk berperan serta dalam membantu kesejahteraan keluarga perlu mendapat perhatian dan dukungan yang positif. Peran kaum perempuan yang memiliki dorongan untuk bekerja di Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam di saat ini janganlah dinilai semata-mata sebagai sebuah alasan untuk mencari kebebasan, tapi nilailah sebagai suatu usaha mulia seorang hamba Allah yang dapat mengangkat harkat dirinya dan keluarganya atau dengan kata lain sebagai suatu usaha untuk merevitalisasi seluruh aspek kehidupannya yang tetap berada dalam rentang kendali Al Qur'an dan Hadis.

Kata kunci : perempuan, hambatan dan peluang

* Makalah ini disampaikan dalam Kegiatan Puskaji yang diselenggarakan oleh LPPM UNISBA, Oktober 2000.

** Sri Hidayati Djoeffan Ir., MT, adalah Staf Pengajar Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UNISBA.

1 Pendahuluan

Gerakan *feminisme* di Indonesia lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, *globalisasi* serta *reformasi* serta kehidupan religius masyarakat. Will Durant dalam bukunya “*The Pleasure of Philosophy*” mengemukakan bahwa peristiwa yang akan menonjol di awal era *glonbalisasi* pada tahun 2000 adalah terjadinya perubahan status wanita.¹

Pandangan *feminisme* di setiap era sangat tergantung kepada kondisi dan situasi zaman yang dihadapinya. Pandangan utama yang sangat menarik terhadap *feminisme* di Indonesia pada saat ini adalah pandangan terhadap kondisi kerja berbagai jenis buruh seperti buruh batik, buruh industri tekstil, petani, tenaga kerja wanita yang diekspor (TKW). Maraknya permasalahan tenaga kerja wanita tersebut, mencuat setelah era industrialisasi merambah daerah perkotaan. Situasi bertambah parah sejak dimulai era reformasi yang terjadi sejak Mei 1999, telah mengakibatkan multi krisis terutama krisis ekonomi yang telah memporak porandakan harapan dan cita-cita bangsa yang aman dan sejahtera. Matinya berbagai sektor ekonomi, terutama industri telah mengakibatkan pengangguran yang tinggi yakni 36 juta jiwa (th. 2000), muncul anak jalanan, meningkatnya kriminalitas. Diketahui bahwa rata-rata proporsi tenaga kerja wanita di sektor industri adalah 47,5% . Ini bukan beban yang kecil. Pengaruh yang tak kalah pentingnya adalah perkembangan teknologi informasi serta *globalisasi* yang selain membawa kemaslahatan juga telah membawa kemudaratn.

Kondisi di atas, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai pergerakan *feminisme* di Indonesia. Perjuangan mereka tidak semata berfokus kepada isue gender semata yang membela buruh

¹ Gina Sonia, *Peluang dan tantangan wanita Muslim dalam menghadapi era Globalisasi*, disampaikan dalam Seminar Sehari Perspektif Islam tentang Eksistensi Wanita dan Sosialisasinya dalam era Globalisasi- Forum Studi wanita Unisba, 15 Juli 1996.

wanita, bahkan kini telah mengarah kepada naluri keibuan sebagai pembela anak-anak, pembela kaum tak mempunyai (tukang becak) yang dipelopori oleh Wardah Hafiz, demokrasi oleh Ratna Sarumpaet.

Makalah ini akan menyingkap pergerakan kaum feminis secara historis khusus di Indonesia, sejak zaman pra kolonial sampai era reformasi, permasalahan feminis yang muncul di permukaan saat ini, potensi dan kendala masalah feminis serta menyusun suatu strategi mendatang sebagai perspektif yang dikaji menurut Qur'an dan Hadits.

2 Sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia

2.1 Sejarah Kolonial (akhir abad 19 awal abad 20)

Di berbagai penjuru Indonesia kita jumpai banyak tokoh terkemuka yang tampil membela hak rakyat. Perhatian pokok mereka tidak semata-mata membela kaumnya saja tapi pada perjuangan bersenjata melawan Belanda seperti dilakukan oleh Cut Meutia dari Aceh, Roro Gusik di Jawa sebagai istri Untung Surapati, di Maluku Martha Tiahahu membantu Pattimura, di Sulawesi Selatan Emmy Saellan giat dalam perlawanannya melawan Wolter Monginsidi.

Tahun 1879 – 1904. Sejarah *feminisme* ketika zaman kolonial telah dipelopori oleh RA Kartini. Ia muncul akhir abad ke 20 (1879-1904). Ia diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya dengan “dipingit” tidak seperti saudara laki-laknya yang disekolahkan di Universitas Leiden negeri Belanda. Ia merasa terhina oleh adanya perkawinan perpaduan (poligami). Ia kemudian memelopori dibukanya sekolah untuk mendidik wanita. Setelah itu lahirlah tokoh feminisme di Jawa Barat yakni Dewi Sartika.

Tahun 1912. Organisasi perempuan yang pertama adalah Poetri Mardika yang lahir tahun 1912. Organisasi ini memiliki hubungan dengan dengan Organisasi Nasional pertama Boedi Oetomo (1908). Setelah Poetri Mardika berdiri, muncullah perkumpulan perempuan lainnya bernama Putri Sejati dan Wanita Utama. Selanjutnya Gerakan Pembaharuan Islam Muhammadiyah yang terbentuk tahun 1917 telah

melahirkan organisasi wanita Aisyiah pada tahun 1920 dan kemudian diikuti oleh organisasi perempuan kaum katolik, dan protestan. Demikian pula di Maluku, Minahasa dan Minangkabau. Gerakan organisasi Aisyiah ini memiliki isue sentral agar perempuan mendapat pendidikan yang baik dan perbaikan kondisi poligini. Sedangkan organisasi perempuan kaum katolik dan protestan menyuarakan anti poligami.

Tahun 1920 muncullah Organisasi Sarekat Rakyat yang menyuarakan peningkatan upah dan kondisi kerja yang baik bagi kaum perempuan. Disusul kemudian oleh lahirnya organisasi lainnya yang memperjuangkan perlunya pendidikan bagi kaum perempuan, menentang perkawinan anak-anak, perpaduan serta perdagangan perempuan dan anak-anak.

Tahun 1928-1930 marak tumbuh berbagai organisasi perempuan. Pada tahun 1928 muncullah 30 organisasi, diantaranya Persatoean Perempuan Indonesia (PPI) yang menyuarakan reformasi pendidikan dan reformasi perkawinan. PPI kemudian namanya diganti menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang menyuarakan penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Organisasi Istri Sedar (1930) masih tetap menyuarakan anti *poligami* dan perceraian. Organisasi perempuan berkembang pesat pada tahun 1930-an.

2.2 Pendudukan Jepang (1942)

Organisasi Serikat Rakyat Istri Sedar merupakan organisasi yang sebetulnya diperalat oleh pemerintah Jepang yang menyuarakan kecaman terhadap politik pemerintah kolonial Belanda, anti kapitalisme dan menyuarakan perlunya perbaikan nasib kaum perempuan proletar.

Pada masa inipun telah dibentuk organisasi ***Fujinkai***, yang memperjuangkan pemberantasan buta huruf dan berorientasi pada pekerjaan sosial. Motivasi mendirikan organisasi ini adalah semata-mata memihak Jepang untuk kemenangan Jepang. Anggotanya terdiri

dari istri pegawai negeri serta kegiatan dalam hirarki sejalan dengan kegiatan suami.

2.3 Masa Belanda

1946-1949. Kembali Kongres Wanita Indonesia, menyuarkan upah yang sama, perbaikan hukum perkawinan serta esensi pendidikan untuk perempuan. Wanita Indonesia harus menyokong Indonesia Merdeka, bergabung dengan pasukan bersenjata dan ikut perang gerilya. Belanda dikalahkan pada tahun 1949.

2.4 Pasca Kemerdekaan – Orde Lama

Tahun 1950 organisasi wanita berangsur-angsur hancur, disamping itu muncullah GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) sebagai kelanjutan dari Istri Sedar. Organisasi ini tersebar di berbagai kegiatan masyarakat seperti warung, koperasi, koperasi simpan pinjam, petani, buruh pabrik, taman kanak-kanak yang diselenggarakan di pasar, perkebunan, kampung, Badan Penyuluh Perkawinan, dan kursus-kursus dengan materi buku ajaran komunis. Organisasi ini menyuarkan : *sukseskan pemilu, anti perkosaan, peningkatan kesadaran perempuan tani, berantas buta huruf, hukuman berat bagi pemerkosa dan penculikan, kegiatan sosek bagi kaum perempuan, pendidikan masalah politik, kesehatan, dan monogami.* Pada dasarnya organisasi ini menyokong kampanye politik terpenting yang dilakukan oleh PKI. Anggota organisasi ini terdiri dari lapisan menengah ke bawah dan kelas buruh.

Tahun 1955 muncul Organisasi Perempuan Islam dan Nasionalis, serta berbagai kegiatan yang terikat pada partai politik dan gerakan keagamaan dalam bentuk Balai-balai Perempuan, Bank-bank Perempuan, Surau Perempuan, Organisasi Perempuan serta Majalah Perempuan. Selain itu, tahun 1954 lahir pula organisasi PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia).

2.5 Masa Orde baru

Pada era ini organisasi masa mengalami pengekan hingga tahun 1968. Tahun 1966 hingga 1970 terjadi pembersihan PKI. Satu-satunya organisasi yang hidup adalah Perwari. Kemudian 1978 Perwari dilebur kedalam Golkar. Pada tahun inilah hilang organisasi wanita yang bersifat independen, akan tetapi lahir beberapa organisasi besar seperti : Golkar, Dharma Wanita (istri PNS), Dharma Pertiwi (Istri yang suaminya bekerja di Angkatan Bersenjata) serta organisasi PKK. Adanya bentuk organisasi seperti ini telah menciptakan banyak organisasi di setiap departemen, muncul organisasi perempuan istri pejabat yang bersifat semu. Kegiatan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan suami. Organisasi ini mendapat bantuan dari pemerintah baik politik maupun praktis, memperoleh berbagai kemudahan transportasi, kantor, keuangan dsb. Akhirnya timbul suatu *image* dimana pemerintah menggambarkan menguasai hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan organisasi perempuan. Orientasi organisasi wanita ini antara lain (a) kesemuanya dipolitisir untuk kemenangan Golkar dan sebagai alat untuk menjaga agar tak ada orang/golongan masyarakat yang menentang rezim yang berkuasa, (b) menentang kecenderungan laki-laki melecehkan perempuan, (c) kegiatan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan suami, (d) mendukung birokrasi militer. Sehingga wanita kurang berkiprah di dalam birokrasi dan pembangunan, selain itu hanya ada dua organisasi wanita yang boleh bergerak di perdesaan yaitu Aisyiah dan PKK.

2.6 Era Reformasi

Runtuhnya Orde Baru yang telah menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertahan selama 32 tahun telah membawa implikasi dan krisis yang bersifat multidimensi. Berbagai belenggu yang menyangkut kebebasan berorganisasi, berpendapat dalam setiap aspek kelembagaan baik formal maupun non formal telah membuka pintu derasnya arus demokrasi dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Demokrasi yang datang ditengah hiruk pikuknya globalisasi telah memunculkan berbagai problematika yang kompleks. Problematika yang mendasar dan paling dirasakan masyarakat banyak adalah keterpurukan ekonomi yang menciptakan beban berat yang membawa implikasi antara lain adalah tingginya angka pengangguran (36 juta jiwa) yang mengakibatkan munculnya anak jalanan/vandalisme dan kriminalitas, peningkatan biaya hidup, kecemburuan ekonomi yang mengakibatkan isu sara yang mengancam tatanan fisik dan moral masyarakat, krisis kepercayaan terhadap penguasa, dsb.

Dalam era reformasi, munculnya berbagai organisasi wanita yang membangkitkan kembali para reformis wanita seperti tahun 1930-an yang tidak saja membela kaumnya sendiri, melainkan juga membela dan memikirkan nasib masyarakat marjinal, berbagai organisasi LSM yang membela rakyat kecil antara lain Wardah Hafiz, kelompok perempuan yang menamakan Suara Ibu Peduli yang membela hak anak, Ratna Sarumpaet yang memperjuangkan demokrasi dan hak buruh perempuan lewat organisasi Teaternya, Nursyahbani Kacasungkana yang membela wanita dari obyek kekerasan dan kejahatan melalui supremasi hukum, tidak ketinggalan Ibu Aisyah Amini yang telah berkiprah dalam dunia politik sejak lama, serta masih banyak lagi tokoh wanita Islam lainnya yang berkiprah dalam organisasi wanita.

3 Permasalahan Perempuan Masa Kini

Permasalahan perempuan masa kini masih menunjukkan sebagian gambaran permasalahan masa lalu yang belum terselesaikan. Seperti telah dikemukakan di atas, masalah kini semakin kompleks, berbagai permasalahan yang muncul merupakan senyawa dari masalah lokal/internal dan global/eksternal.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PAP pada tahun 1999, terdapat delapan prioritas masalah perempuan Indonesia².

Tabel 1. Delapan prioritas persoalan perempuan Indonesia

No.	Persoalan	Frekuensi	Persen
1	Jumlah perempuan dalam posisi pengambil keputusan sedikit	96	92,3
2	Perempuan korban kekerasan/pelecehan seksual kurang mendapat perlindungan hukum.	91	87,5
3	Upah pekerja perempuan lebih rendah dari upah laki-laki.	82	78,8
4	Pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi di lingkungan pekerjaan	79	76,0
5	Perempuan cenderung dijadikan obyek seksual di media massa	78	76,0
6	Tidak adanya perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga perempuan	78	75,0
7	Terjadinya eksploitasi terhadap perempuan melalui pengiriman TKW ke luar negara	78	75,0
8	Tidak dipenuhinya hak cuti khusus bagi pekerja perempuan	73	70,2

Keterangan : jumlah sampel = 108

² Yayasan Jurnal Perempuan YJP, *Aspirasi Perempuan anggota Parlemen terhadap pemberdayaan politik perempuan*, International IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance, Yayasan Jurnal Perempuan, 1999, Hal 23

Munculnya berbagai permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan sebagai berikut :

Pertama, kondisi politik. Perempuan belum terwakili secara proporsional dalam posisi politik strategis. Jumlah wanita yang menduduki jabatan eselon I dan II departemen hanya 5,5% atau 843 atau 15.332 orang³. Hal ini dapat disebabkan oleh sosialisasi keluarga yang menanamkan bahwa pendidikan politik itu keras, jahat, dunia laki-laki, penuh persaingan tidak sehat, tidak tepat bagi perempuan. Aktif dalam pendidikan politik perlu kesediaan waktu tanpa batas.

Kedua, kondisi sosial – ekonomi. Masalah utama yang dihadapi adalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Saat ini perempuan Indonesia memiliki peran ganda, disatu sisi sebagai ibu rumah tangga dan disisi lainnya sebagai wanita karier yang ternyata belum diimbangi oleh perubahan infrastruktur dan tata nilai-nilai religius yang memadai. Arus peran ganda ini merupakan konsekuensi logis dari hadirnya industrialisasi dan urbanisasi serta kondisi ekonomi negara yang ada dalam krisis berkepanjangan. Dalam transformasi menuju era masyarakat industri dan kondisi krisis tersebut, wanita dipaksa menanggung beban keluarga, menjadi tenaga pekerja. Rendahnya tingkat pendidikan secara umum yang dimanifestasikan ke dalam ketrampilan buruh dapat menyebabkan buruh wanita masuk ke dalam kelompok *vulnerable* (kelompok rentan) dan akan masuk kedalam lingkungan kerja yang memiliki predikat 3D, yaitu *dirty* (kotor), *dangerous* (berbahaya) dan *difficult* (kesukaran). Pelecehan seksual dan kriminalitas di kawasan industri menunjukkan frekuensi sangat tinggi. Kompas Agustus 2000 menunjukkan bahwa rata-rata angka aborsi di Indonesia telah menunjukkan 2 juta /tahun yang lebih tinggi dari rata-rata di dunia 1,7 juta/tahun. Obyek penelitian ini dilakukan disekitar Jakarta (Jabotabek). Demikian pula wanita perdesaan, ia mempunyai peran sama dengan pria yang tidak selalu menyandarkan dirinya pada pria.

³ *Ibid*, hal.24

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa 60% perempuan Indonesia harus menghidupi diri sendiri dan keluarganya (Kompas 4 juli 2000). Selain itu kondisi umum keterlibatan perempuan dalam pembangunan tidak menghasilkan manfaat bagi perempuan sendiri. Sukses besar peran perempuan dalam menurunkan angka kelahiran 6,2% pada tahun 1970-an menjadi 3,2% pada tahun 80-an ternyata tidak diikuti oleh berubahnya status kesehatan perempuan.

Ketiga, masalah yang berkaitan dengan aspek ideologis dan psikologis. Masalah ini terutama dihadapi oleh wanita yang berkiprah di bidang politik, yang meliputi peran tradisional, kurangnya kepercayaan, peran media massa. Peran tradisional perempuan dalam dunia politik menuntut perubahan pola emosi, cara memandang sesuatu serta berfikir sebagai proses dalam memutuskan sesuatu hal. Pola pendidikan yang berlangsung lama dalam lingkup tradisional perlu diubah, hal ini dapat mematikan potensi kreatif dan memperlemah kekuatan intelektual. Sebenarnya membuat keputusan bukanlah karakter khusus gender, melainkan kemanusiaan pada umumnya, atau dengan kata lain seorang manusia memegang kekuasaan adalah alami, dan seorang perempuan memegang kekuasaan adalah alami juga, atau seharusnya demikian. Kurang kepercayaan diri merupakan alasan utama perempuan tidak terwakili dalam organisasi politik. Perempuan memiliki potensi sebagai juru kampanye, pengorganisir pendukung mobilisasi, tapi takut berkompetisi memperebutkan kedudukan atau posisi dalam parlemen (misalnya). Ia masih dihindangi budaya takut berkompetisi.

Reformasi yang datang seiring dengan arus globalisasi yang diakui menguntungkan kebebasan pers telah dimanipulasi dengan beredarnya publikasi melalui media cetak dan elektronik seperti : televisi dengan sinetron dan iklan, internet dengan situs tertentu, penerbitan majalah, surat kabar yang mengarah ke pornografi dengan menampilkan wanita dengan pose yang seronok yang menawarkan gaya hidup yang konsumtif dan pada akhirnya akan merusak lingkungan secara luas.

4 Peluang Gerakan Feminisme di Indonesia

Peluang gerakan feminisme di Indonesia meliputi tiga aspek, yakni dikaji dari Al Qur'an, legitimasi dan kondisi sosial masyarakat.

4.1 Al Qur'an

Bahasan ditinjau dari kejadian pria dan wanita, nilai dan kualitas.

Pertama, ditinjau dari kejadian wanita dan pria . Wanita dan pria merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan, saling melengkapi. Allah berfirman “ *Yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah cipatakan istrinya*” (QS AnNisa : 1). Demikian pula dalam proses penciptaan Allah SWT menegaskan bahwa pria dan wanita mengalami eksperimen tersebut bersama-sama, dan keduanya terkena godaan syetan yang mengatakan : “*Sesungguhnya aku adalah termasuk yang memberi nasihat kepada kamu berdua* (QS, Al A'raaf ; 21); “*Maka keduanya memakan buah dari pohon itu*” (QS, AT Thaahaa : 121)

Kedua, ditinjau dari nilai dan kualitas (al qimah), baik positif maupun negatif, laki-laki dan perempuan, “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar* (QS, Al Azhab : 35). Demikian pula Allah telah mengatakan bahwa tolok ukur amal yang utama dalam Islam adalah ketaqwaan kepada Allah dan seberapa dekat dan jauh orang dariNya, seperti tercantum dalam QS. Al Hujuraat : 13 “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara sisi kamu disisi*

Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu“. Selain itu, dalam QS : Surat An Nahl : 97 dinyatakan bahwa, “*Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan“.*

4.2 Legitimasi Hukum

Pertama, dalam pasal 27 UUD 45 mengatakan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pekerjaan yang layak serta sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan.

Kedua, dengan dicantumkan kemitra-sejajaran wanita dan pria dalam GBHN serta dicanangkan Hari Kemitra-Sejajaran Wanita dan Pria pada Peringatan Hari Ibu ke 67 tahun 1995, maka peluang perempuan Indonesia untuk berperan dalam pembangunan sangatlah besar. Wanita tidak saja berperan sebagai objek pembangunan, tapi juga berperan sebagai subjek pembangunan.

Ketiga, kesadaran wanita yang bersifat universal telah melahirkan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM) pada Desember 1948. DUHAM lahir oleh adanya diskriminasi terhadap perempuan di dunia yang telah terlanjur dijadikan manusia kelas dua dalam pelbagai bidang kehidupan, mulai dari upah yang lebih kecil dari lawan jenisnya dan sebagainya yang dapat dirasakan sebagai suatu ceritera klise yang menjemukan dan tidak menarik minat.

4.3 Kondisi Sosial

Jumlah perempuan Indonesia secara kuantitas relatif lebih besar dari jumlah pria. Menurut seorang informan dari FPP, “gampang saja sebetulnya kalau mengalahkan Golkar, buat saja Partai Perempuan, maka 52% pemilih ada di tangan perempuan. Data statistik perempuan sangat strategis untuk digunakan dalam politik. Akan tetapi jumlah ini belum secara proporsional dapat mewakili jumlah

suara perempuan. Disamping itu tumbuhnya berbagai LSM dan hidupnya kembali berbagai organisasi perempuan yang bersifat formal dan non formal dapat menampung berbagai aspirasi dan partisipasi ke arah pembangunan diri dan bangsa yang positif.

Aplikasi dari berbagai kajian Al Qur'an diatas, telah tercermin pada salah satu sisi kehidupan Nabi Muhammad saw yang mengakui eksistensi wanita muslim sebagai mana layaknya dikatakan oleh beliau bahwa sorga terletak di telapak kaki ibu (wanita). Demikian pula salah seorang istri nabi seperti Siti Khodijah telah menjadi sponsor utama dalam mendanai perang. Ia adalah pengusaha yang handal saat itu. Demikian pula Siti Aisyah yang turun ke medan perang merupakan wanita yang diakui kecerdasannya.

Tuntunan Al Qur'an dan biografi nabi pada dasarnya diharapkan akan merupakan salah satu rambu dasar gerakan kaum feminis di Indonesia.

5 Strategi Feminisme di Indonesia

Dilihat dari berbagai permasalahan dan potensi yang telah diuraikan di diatas, perempuan Indonesia memiliki berbagai peluang sebagai warga negara yang dapat turut membangun bangsanya. Untuk dapat merealisasikan aspirasi dan partisipasi dalam pembangunan, diperlukan berbagai strategi untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :

- (1) Wanita turut menyerukan perbaikan ekonomi skala nasional yang dapat segera menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Perlu penggalangan semua potensi baik laki-laki maupun wanita dalam pembangunan negara dalam menghadapi era globalisasi berdasarkan "mitra kesejajaran". Kemiskinan dan pengangguran akan merupakan potensi mundurnya kualitas bangsa.
- (2) Galakkan pengembangan dan peningkatan pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta berbagai pelatihan harus

berlandaskan iman dan taqwa yang memancarkan syiar Islam. Canangkan pendidikan seumur hidup (long life education) yang bersifat terbuka.

- (3) Dialog secara luas mengenai wanita dan kewanitaan dikaji dari agama (Qur'an dan Hadits), dituntut keikhlasan pria muslim terhadap eksistensi wanitanya yang dijabarkan dalam berbagai masukan/pertimbangan terhadap kaum perempuan yang berkiprah dalam pembangunan agar tercipta umat yang maslahat. Seperti tercantum dalam QS, An Nisa : 34 , firman Allah SWT, "*Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain* " dan dalam QS, Al Baqarah : 228, Allah berfirman, "*...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan hak laki-laki atas mereka secara patut, dan laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada perempuan*". Perlu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, kepercayaan, saling hormat –menghormati, saling memberi dan bukan saling mengorbankan dan bahkan merugikan masing-masing pihak dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan resiko.
- (4) Meningkatkan supremasi hukum dengan melengkapi peraturan yang belum mencapai sasaran, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memberikan sanksi terhadap para pelanggar hukum yang setimpal demi kesejahteraan rohani, jasmani, dunia dan akhirat.
- (5) Dirikan infrastruktur yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keamanan, kenyamanan bagi wanita bekerja baik di lokasi kerja maupun di tempat permukimannya, seperti :
 - Fasos dan fasum yang meliputi, ruang ibadah, poliklinik, balai penitipan anak dan bayi, cafetaria, ruang bermain anak, sarana pondokan
 - Sekolah berdekatan dengan tempat kerja.

- Pola lingkungan permukiman sehat, aman, lestari dan nyaman.
- (6) Bagi wanita melakukan kegiatan di luar rumah harus mempertimbangkan prasyarat sebagai berikut:
- Mengkaji potensi, hambatan, peluang serta ancaman, termasuk kesepakatan suami. Tidak semua wanita dianjurkan masuk kedalam organisasi politik ataupun bekerja. Sesuaikan kemampuan dirinya, karena menjadi ibu rumah-tanggapun merupakan ibadah yang mulia.
 - Utamakan tugas domestik.
 - Pilih pekerjaan yang memiliki konflik fisik dan sosial seminimal mungkin.
 - Memiliki ketahanan fisik dan mental yang kuat, kesehatan rohani dan jasmani merupakan syarat prima.
 - Organisasi wanita harus membuat konsep manajemen bekerja paruh waktu yang kini telah berlaku di berbagai negara benua Amerika dan Eropa, sehingga perempuan punya keleluasaan bekerja sambil mengurus rumah tangga serta kodrat kewanitaan sebagai ibu dan istri tetap terjaga. Konsep ini dapat terealisasi dengan adanya akses teknologi informasi yang telah masuk dalam kehidupan masyarakat di perkotaan.

6 Penutup

Perempuan Indonesia menurut data statistik dapat dilibatkan dalam berbagai peran, seperti dalam kancah politik, bisnis, dan teknologi. Dalam peran politik kaum ini memiliki kemungkinan dapat menyukseskan kepentingan suatu partai. Dalam bisnis selain kaum perempuan dapat berperan sebagai pencipta komoditas sekaligus konsumen. Dalam aspek teknologi selain sebagian besar pengguna (“user”) juga dapat berperan sebagai tenaga kerja. Peran perempuan dalam bidang sosial, hingga saat ini masih dalam proses pencapaian mitra sejajar baik dalam bidang pendidikan maupun bidang usaha.

Perempuan Indonesia kini berada dalam suatu era transisi kebudayaan, ia memiliki peran ganda yang tidak ringan. Ia harus dapat berhati-hati menentukan posisi dan perannya, hingga dalam melakukan kegiatannya hendaknya tidak menjadi korban berbagai kepentingan individu maupun kelompok, swasta maupun birokrat. Harus selalu berada dalam koridor etis dan moralis, berikanlah perlindungan hukum yang layak padanya. Karena perempuan Indonesia akan memberi kontribusi yang penting terhadap kesejahteraan keluarga, bangsa, negara dan agamanya.

DAFTAR PUSTAKA:

Al Qur'an.

A. Nunuk Prasetyo Murniati, *Gerakan Anti kekerasan perempuan*, Kanisius, Jogjakarta, 1998

Femina , 15-21 Juli 1999.

Freddy Rangkuty, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi Abad 21*, Gramedia, Jakarta, 1982.

Gina Sonia, *Peluang dan tantangan wanita Muslim dalam menghadapi era Globalisasi*, disampaikan dalam Seminar Sehari Perspektif Islam tentang Eksistensi Wanita dan Sosialisasinya dalam era Globalisasi- Forum Studi wanita Unisba, 15 Juli 1996.

Harian Kompas, Edisi bulan Juli dan Agustus 2000.

- Ibnu Mustafa, *Wanita Islam menjelang tahun 2000*, Al Bayan, Bandung, 1993.
- Lembaga Studi Pers dan pembangunan - The Asia Foundation - USAID, *Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan*, SMK Mardi Yuana, Bogor 1999.
- Mely G. Tan, *Perempuan Indonesia, pemimpin masa depan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1991.
- Panji Masyarakat, *Peranan Muslimah dalam Era Budaya Global*, edisi tahun XXXV, 6-15 Jumadil Ula 1413 H.
- Saskia Wieringa, *Kuntulanak wangi - organisasi perempuan di Indonesia sesudah 1950*, Kalyanamitra- Pusatkomunikasi dan Informasi Perempuan , Jakarta , 1998.
- Sayid Muhammad Husain Fadlulah, *Dunia Wanita dalam Islam*, Lentera, Jakarta 2000.
- Seri siasat kebudayaan, *Citra wanita dan kekuasaan*, Kanisius, Jakarta, 1992
- Undang-Undang HAM 1999, Sinar Grafika Offset, jakarta, 2000-08-29.
- Yayasan Jurnal Perempuan YjP, *Aspirasi Perempuan anggota Parlemen terhadap pemberdayaan politikm perempuan*, *International IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance*, Yayasan Jurnal Perempuan , 1999, Hal 23